

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD. Oleh karena pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara,

Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam PP 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan.

Pertanggungjawaban atas BMN kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi BMN memberikan sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos aset tetap maupun aset lainnya.

Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMN. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (*controlling*) atas BMN. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam

perencanaan pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (*disposal*).

### **B. Deskripsi Singkat**

Materi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) sebagai sub sistem dari Sistem Akuntansi Instansi selain Sistem Akuntansi Keuangan disajikan untuk meningkatkan pemahaman serta kontrol yang sistematis bagi mereka yang pernah atau yang memang berada dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari satuan kerja pada bagian atau seksi perlengkapan/ rumah tangga atau yang semacamnya sehingga sesuai struktur Unit Akuntansi Barang melekat kewajiban untuk penyusunan laporan barang milik negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga. SIMAK-BMN dan SAK sebagai sub sistem harus saling berjalan secara simultan. Dengan demikian dapat dilakukan *check and balance* antara arus uang dan arus barang.

Selain itu, SIMAK-BMN juga menyatukan konsep manajemen barang dengan pelaporan untuk tujuan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dalam bentuk neraca. Sehingga dengan demikian SIMAK-BMN dapat memenuhi kebutuhan manajerial dan pertanggungjawaban sekaligus.

### **C. Tujuan Instruksional Umum (TIU)**

Modul Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara disusun dan disampaikan kepada peserta diklat dengan tujuan agar para peserta lebih menguasai dan mampu melaksanakan pelaporan barang milik negara dalam kerangka SIMAK-BMN dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang akuntansi dan pelaporan barang milik negara sehingga dapat memberi nilai manfaat dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat.

### **D. Tujuan Instruksional Khusus (TIK)**

Setelah membaca modul ini, pembaca diharapkan mampu:

1. Melaksanakan Akuntansi Barang Milik Negara dengan baik dan benar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menjelaskan Dasar Hukum Akuntansi Barang Milik Negara.

3. Mengetahui Struktur, Tugas dan Fungsi Organisasi Akuntansi Barang Milik Negara.
4. Menjelaskan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang milik Negara dalam kaitan dengan Sistem Akuntansi Keuangan.
5. Memecahkan masalah dalam pelaksanaan Akuntansi Barang Milik Negara baik secara fungsional maupun yang berkaitan dengan aplikasi.
6. Menjelaskan Laporan Barang Milik Negara yang terkait dengan Laporan Keuangan berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan Ringkas BMN.
7. Memahami konsep penyusutan Aset Tetap dalam SIMAK-BMN
8. Menguasai teknis pengiriman Laporan Barang Milik Negara kepada Laporan Keuangan dengan baik dan benar.
9. Menjelaskan posisi aset tetap dalam neraca yang terkait dengan belanja modal dan saldo awal aset tetap.
10. Menjelaskan perlakuan akuntansi atas Aset Tetap dalam Renovasi.

#### **E. Topik Bahasan**

Hal-hal yang perlu dibahas meliputi:

1. BMN dalam kerangka SAPP
2. Kebijakan Akuntansi atas BMN
3. Prosedur Akuntansi atas BMN
4. Kapitalisasi BMN
5. Penyusutan Aset Tetap
6. Rekonsiliasi BMN

#### **F. Cakupan Modul**

##### **I. BMN dalam SAPP**

- a. Pengertian umum BMN
- b. BMN dalam neraca
- c. Klasifikasi BMN
- d. Pengkodean BMN
- e. Kondisi BMN
- f. Jenis-jenis laporan BMN
- g. Catatan Ringkas BMN

**II. Kebijakan Akuntansi BMN**

- a. Aset Tetap: Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Aset Tetap dalam Renovasi
- b. Perolehan BMN Gabungan
- c. Aset Bersejarah

**III. Prosedur Akuntansi BMN**

- a. Organisasi SAI
- b. Organisasi Akuntansi BMN
- c. Jenis-jenis Transaksi dalam Akuntansi BMN
- d. Prosedur Akuntansi BMN pada UAKPB
- e. Prosedur Akuntansi BMN pada UAPPB-W
- f. Prosedur Akuntansi BMN pada UAPPB-E1
- g. Prosedur Akuntansi BMN pada UAPB